

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia keberadaan industri perbankan syariah diakui secara formal sejak diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Menurut undang-undang tersebut, terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia yaitu bank umum syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1991 di provinsi Jawa Barat. Sampai dengan Desember 2017, tercatat ada 167 BPRS di Indonesia, dan jumlah BPRS terbanyak berada di provinsi Jawa Timur dengan jumlah 29 BPRS dan disusul provinsi Jawa Barat sebanyak 28 BPRS. Di peringkat ketiga jumlah BPRS terbanyak berada di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 26 BPRS, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan ke empat dengan jumlah BPRS sebanyak 12, dan provinsi Nangroe Aceh Darussalam di posisi berikutnya dengan jumlah BPRS sebanyak 10. Jumlah ini meningkat dari tahun 2012, ada 158 BPRS di Indonesia kemudian pada tahun berikutnya 2013 ada 163 BPRS, kemudian angka ini kembali meningkat sampai dengan Desember 2017 sebanyak 167 BPRS di Indonesia. Di provinsi Jawa Timur, sebagai provinsi dengan BPRS terbanyak di Indonesia justru terjadi penurunan jumlah BPRS, sejak tahun 2012 jumlah BPRS di provinsi Jawa Timur sejumlah 31 BPRS yang kemudian menjadi 29 BPRS di akhir Desember 2017 (Lampiran 1 tabel jumlah BPRS berdasarkan provinsi).

Tujuan pendirian BPRS adalah untuk melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum. Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha BPR konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya BPRS harus sejalan dengan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya. BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.

BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau kombinasinya. Modal untuk mendirikan BPRS adalah Rp2 milyar untuk wilayah Jabotabek, Rp1 milyar untuk ibukota propinsi, dan Rp500 juta di luar Jabotabek dan ibukota propinsi. Modal disetor BPRS tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk kegiatan yang melanggar hukum. BPRS dalam mengembangkan usahanya diperkenankan membuka kantor cabang namun dibatasi hanya dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Sedangkan untuk membuka

kantor kas, hanya dapat didirikan dalam wilayah kabupaten/kotamadya yang sama dengan kantor induknya.

Manajemen BPRS terdiri dari minimal dua orang anggota direksi dan satu orang komisaris serta satu orang DPS. Jumlah direksi minimal dua orang dengan pendidikan minimal diploma III dan 50% diantaranya wajib memiliki pengalaman operasional perbankan syariah sedangkan bagi direksi yang tidak berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. Komisaris BPRS wajib memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan di bidang perbankan syariah. Untuk menjaga kemungkinan kolusi maka seorang direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris.

Secara nasional, kinerja keuangan BPRS meningkat pesat, tahun 2015 aset BPRS secara nasional tercatat Rp 7,739,270 juta rupiah, tahun 2016 aset BPRS meningkat menjadi Rp 9,157,801 juta rupiah, dan di penghujung tahun 2017 aset BPRS secara nasional meningkat menjadi Rp 10,840,375 juta rupiah. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, BPRS secara nasional juga terus mengalami peningkatan, di 2015 dana masyarakat yang terhimpun baik berupa tabungan maupun deposito berjangka adalah sebesar Rp 4,801,888 juta rupiah, di tahun 2016 sebesar Rp 5,823,964 juta rupiah, dan di tahun 2017 sebesar Rp 6,987,280 juta rupiah secara nasional. Ada peningkatan rata-rata Rp 1 trilyun rupiah setiap tahunnya. Dari sisi pembiayaan secara nasional, BPRS sukses menyalurkan dananya sebesar Rp 5,765,171 juta rupiah di tahun 2015, kemudian di tahun 2016 disalurkan sebesar Rp 6,662,556 juta rupiah, dan di tahun 2017 disalurkan sebesar Rp 7,763,951 juta rupiah (Lampiran 1 tabel neraca tabungan BPRS).

Sesuai prinsipnya, dana yang diterima dari masyarakat dikelola dengan prinsip syariah dan disalurkan pada UMKM yang menjalankan usaha yang halal secara Islam. Secara nasional pada tahun 2017, BPRS menyalurkan pembiayaan pada mereka yang membutuhkan modal dalam beberapa akad, antara lain Akad Mudharabah sebesar Rp 124,497 juta rupiah, Akad Musyarakah sebesar Rp 776,696 juta rupiah, Akad Murabahah sebesar Rp 5,904,751 juta rupiah, Akad Istishna sebesar Rp 21,426 juta rupiah, Akad Ijarah sebesar Rp 22,316 juta rupiah, Akad Qardh sebesar Rp 189,866 juta rupiah, dan pembiayaan Multijasa sebesar Rp 724,398 juta rupiah sehingga keseluruhan pembiayaan yang disalurkan BPRS secara nasional sebesar Rp 7,763,951 juta rupiah.

Dalam aktivitas usahanya, secara nasional profitabilitas yang diraih BPRS meningkat tajam dari tahun ketahun, pada tahun 2015 total pendapatan BPRS secara nasional sebesar Rp 874,261 juta rupiah, sementara total beban pada tahun yang sama sebesar Rp 701,933 juta rupiah, dan laba tahun berjalan tahun 2015 sebesar Rp 172,327 juta rupiah. Di tahun 2016 total pendapatan BPRS secara nasional sebesar Rp 976,450 juta rupiah, sementara total beban pada tahun yang sama sebesar Rp 778,018 juta rupiah, dan laba tahun berjalan tahun 2016 sebesar Rp 198,432 juta rupiah. Di tahun 2017 total pendapatan BPRS secara nasional sebesar Rp 1,136,085 juta rupiah, sementara total beban pada tahun yang sama sebesar Rp 870,078 juta rupiah, dan laba tahun berjalan tahun 2017 sebesar Rp 266,007 juta rupiah. Lonjakan laba terbesar terjadi antara tahun 2016 ke 2017, terjadi peningkatan laba sebesar Rp 67 milyar secara nasional (Lampiran 1 tabel laporan laba rugi gabungan BPRS).

Provinsi Jawa Timur memiliki paling banyak BPRS daripada di provinsi yang lain, tercatat pada tahun 2017 sebanyak 29 BPRS beroperasi di wilayah provinsi Jawa Timur. 29 BPRS tersebut tersebar di 20 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur antara lain 2 BPRS di Kabupaten Gresik, 1 BPRS di Kabupaten Jember, 1 BPRS di Kabupaten Jombang, 2 BPRS di Kabupaten Kediri, 1 BPRS di Kabupaten Lamongan, 1 BPRS di Kabupaten Magetan, 2 BPRS di Kabupaten Malang, 1 BPRS di Kabupaten Pamekasan, 3 BPRS di Kabupaten Pasuruan, 2 BPRS di Kabupaten Ponorogo, 1 BPRS di Kabupaten Probolinggo, 1 BPRS di Kabupaten Sampang, 3 BPRS di Kabupaten Sidoarjo, 1 BPRS di Kabupaten Situbondo, 1 BPRS di Kabupaten Sumenep, 1 BPRS di Kota Batu, 1 BPRS di Kota Kediri, 1 BPRS di Kota Malang, 1 BPRS di Kota Mojokerto, dan 2 BPRS di Kota Surabaya. Secara keseluruhan, aset BPRS di provinsi Jawa Timur pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 1,666,378,327 ribu rupiah, jika dibandingkan dengan aset BPRS nasional, maka BPRS provinsi Jawa Timur memiliki aset sebesar 15.37% dari aset BPRS nasional. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, pada 2017 BPRS di provinsi Jawa Timur menghimpun dana sebesar Rp 1,062,205,575 ribu rupiah atau sebesar 15.20% dari penghimpunan dana BPRS nasional. Dari sisi penyaluran dana pada masyarakat BPRS di provinsi Jawa Timur sukses menyalurkan dana sebesar Rp 1,235,043,845 ribu rupiah atau sebesar 15.91% penyaluran dana BPRS nasional terjadi di provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa provinsi Jawa Timur khususnya di 20 Kabupaten/Kota sebaran BPRS di provinsi ini, memiliki potensi yang besar dan memiliki tingkat perekonomian masyarakat yang cukup tinggi di tingkat nasional.

Tabel 1.1 Sebaran BPRS di Provinsi Jawa Timur

NO	NAMA PERUSAHAAN	KAB/KOTA
1	PT BPRS Baktimakmur Indah	Kab. Sidoarjo
2	PT BPRS Asri Madani Nusantara	Kab. Jember
3	PT BPRS Bhakti Haji	Kab. Malang
4	PT BPRS Amanah Sejahtera	Kab. Gresik
5	PT BPRS Daya Artha Mentari	Kab. Pasuruan
6	PT BPRS Al Mabrur Babadan	Kab. Ponorogo
7	PT BPRS Ummu	Kab. Pasuruan
8	PT BPRS Bumi Rinjani Batu	Kota Batu
9	PT BPRS Situbondo	Kab. Situbondo
10	PT BPRS Bhakti Sumekar	Kab. Sumenep
11	PT BPRS Lantabur Tebui reng	Kab. Jombang
12	PT BPRS Jabal Tsur	Kab. Pasuruan
13	PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	Kab. Probolinggo
14	PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen	Kab. Malang
15	PT BPRS Karya Mugi Sentosa	Kota Surabaya
16	PT BPRS Jabal Nur	Kota Surabaya
17	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	Kab. Gresik
18	PT BPRS Sarana Prima Mandiri	Kab. Pamekasan
19	PT BPRS Tanmiya Artha	Kota Kediri
20	PT BPRS Annisa Mukti	Kab. Sidoarjo
21	PT BPRS Madinah	Kab. Lamongan
22	PT BPRS Artha Pamenang	Kab. Kediri
23	PT BPRS Rahma Syariah	Kab. Kediri
24	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	Kota Malang
25	PT BPRS Unawi Barokah	Kab. Sidoarjo
26	PT BPRS Kota Mojokerto	Kota Mojokerto
27	PT BPRS Magetan	Kab. Magetan
28	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	Kab. Sampang
29	PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera	Kab. Ponorogo

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan Diolah - <https://goo.gl/871P3C>

Tabel 1.2 dibawah ini akan menunjukan kondisi kinerja keuangan BPRS di provinsi Jawa Timur dari sisi aset, penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana pada masyarakat, penyertaan modal oleh pemegang saham dan laba (rugi) sebelum pajak pada bulan Desember 2017.

Tabel 1.2 Aset BPRS di provinsi Jawa Timur (Dalam Ribuan Rp)

NO	PERINGKAT	NAMA PERUSAHAAN	ASET
1	1	PT BPRS Bhakti Sumekar	769,057,354
2	2	PT BPRS Baktimakmur Indah	152,421,824
3	3	PT BPRS Lantabur Tebuireng	124,031,441
4	4	PT BPRS Kota Mojokerto	92,731,820
5	5	PT BPRS Amanah Sejahtera	87,750,086
6	6	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	59,971,513
7	7	PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen	50,239,492
8	8	PT BPRS Sarana Prima Mandiri	37,023,322
9	9	PT BPRS Artha Pamenang	32,810,623
10	10	PT BPRS Al Maburr Babadan	30,856,633
11	11	PT BPRS Jabal Nur	28,004,937
12	12	PT BPRS Asri Madani Nusantara	25,860,098
13	13	PT BPRS Magetan	24,968,076
14	14	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	20,173,456
15	15	PT BPRS Madinah	19,530,911
16	16	PT BPRS Bumi Rinjani Batu	15,664,725
17	17	PT BPRS Jabal Tsur	15,263,701
18	18	PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera	13,410,291
19	19	PT BPRS Daya Artha Mentari	11,767,700
20	20	PT BPRS Situbondo	11,648,034
21	21	PT BPRS Ummu	9,893,335
22	22	PT BPRS Annisa Mukti	9,836,094
23	23	PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	9,639,196
24	24	PT BPRS Rahma Syariah	7,283,831
25	25	PT BPRS Bhakti Haji	3,525,057
26	26	PT BPRS Unawi Barokah	3,014,777
27	***	PT BPRS Karya Mugi Sentosa	***
28	***	PT BPRS Tanmiya Artha	***
29	***	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	***

***) Data Tidak Tersedia

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan Diolah - <https://goo.gl/tWFbMu>

Tabel 1.2 diatas menunjukan posisi aset BPRS di provinsi Jawa Timur posisi bulan Desember 2017. Dan di peringkat berdasarkan kepemilikan aset BPRS dari yang paling besar sampai yang paling kecil.

Tabel 1.3 DPK BPRS di provinsi Jawa Timur (Dalam Ribuan Rp)

NO	PERINGKAT	NAMA PERUSAHAAN	DPK
1	1	PT BPRS Bhakti Sumekar	441,569,204
2	2	PT BPRS Lantabur Tebuireng	107,255,781
3	3	PT BPRS Baktimakmur Indah	99,064,013
4	4	PT BPRS Amanah Sejahtera	73,850,340
5	5	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	51,985,644
6	6	PT BPRS Kota Mojokerto	39,037,483
7	7	PT BPRS Sarana Prima Mandiri	32,176,455
8	8	PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen	30,550,428
9	9	PT BPRS Artha Pamenang	27,978,671
10	10	PT BPRS Al Mabur Babadan	21,673,234
11	11	PT BPRS Jabal Nur	18,925,490
12	12	PT BPRS Asri Madani Nusantara	16,453,239
13	13	PT BPRS Madinah	15,911,235
14	14	PT BPRS Jabal Tsur	13,191,673
15	15	PT BPRS Magetan	11,666,055
16	16	PT BPRS Daya Artha Mentari	9,380,448
17	17	PT BPRS Ummu	7,863,071
18	18	PT BPRS Bumi Rinjani Batu	7,845,425
19	19	PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera	7,555,631
20	20	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	6,806,088
21	21	PT BPRS Annisa Mukti	5,057,612
22	22	PT BPRS Rahma Syariah	4,560,319
23	23	PT BPRS Situbondo	3,633,486
24	24	PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	3,581,629
25	25	PT BPRS Bhakti Haji	2,891,785
26	26	PT BPRS Unawi Barokah	1,741,136
27	***	PT BPRS Karya Mugi Sentosa	***
28	***	PT BPRS Tanmiya Artha	***
29	***	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	***

***) Data Tidak Tersedia

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan Diolah - <https://goo.gl/tWFbMu>

Tabel 1.3 diatas menunjukan posisi penghimpunan dana dari masyarakat / Dana Pihak Ketiga (DPK) BPRS di provinsi Jawa Timur posisi bulan Desember 2017. Dan di peringkat berdasarkan DPK BPRS dari yang paling besar sampai yang paling kecil.

Tabel 1.4 Pembiayaan BPRS di provinsi Jawa Timur (Dalam Ribuan Rp)

NO	PERINGKAT	NAMA PERUSAHAAN	PEMBIAYAAN
1	1	PT BPRS Bhakti Sumekar	528,874,747
2	2	PT BPRS Amanah Sejahtera	127,921,260
3	3	PT BPRS Baktimakmur Indah	121,808,932
4	4	PT BPRS Kota Mojokerto	71,364,067
5	5	PT BPRS Lantabur Tebuireng	59,427,924
6	6	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	51,096,633
7	7	PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen	39,075,322
8	8	PT BPRS Sarana Prima Mandiri	29,611,550
9	9	PT BPRS Artha Pamenang	25,372,931
10	10	PT BPRS Asri Madani Nusantara	21,186,395
11	11	PT BPRS Jabal Nur	20,706,859
12	12	PT BPRS Al Mabrur Babadan	19,851,603
13	13	PT BPRS Magetan	16,619,842
14	14	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	15,545,752
15	15	PT BPRS Madinah	14,261,952
16	16	PT BPRS Jabal Tsur	11,918,139
17	17	PT BPRS Bumi Rinjani Batu	10,333,150
18	18	PT BPRS Daya Artha Mentari	8,969,699
19	19	PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera	7,407,916
20	20	PT BPRS Situbondo	7,120,836
21	21	PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	6,883,907
22	22	PT BPRS Annisa Mukti	6,728,819
23	23	PT BPRS Ummu	5,654,167
24	24	PT BPRS Rahma Syariah	3,686,325
25	25	PT BPRS Bhakti Haji	2,603,667
26	26	PT BPRS Unawi Barokah	1,011,451
27	***	PT BPRS Karya Mugi Sentosa	***
28	***	PT BPRS Tanmiya Artha	***
29	***	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	***

***) Data Tidak Tersedia

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan Diolah - <https://goo.gl/tWFbMu>

Tabel 1.4 diatas menunjukan posisi penyaluran dana pada masyarakat (pembiayaan) BPRS di provinsi Jawa Timur posisi bulan Desember 2017. Dan di peringkat berdasarkan pembiayaan BPRS dari yang paling besar sampai yang paling kecil.

Tabel 1.5 Penyertaan Modal BPRS di Prov Jawa Timur (Dalam Ribuan Rp)

NO	PERINGKAT	NAMA PERUSAHAAN	MODAL SETOR
1	1	PT BPRS Bhakti Sumekar	96,000,000
2	2	PT BPRS Baktimakmur Indah	15,000,000
3	3	PT BPRS Kota Mojokerto	13,772,463
4	4	PT BPRS Bumi Rinjani Batu	12,900,000
5	5	PT BPRS Magetan	9,410,000
6	6	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	7,650,000
7	7	PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera	6,000,000
8	8	PT BPRS Situbondo	5,399,400
9	9	PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	4,700,000
10	10	PT BPRS Amanah Sejahtera	4,664,200
11	11	PT BPRS Jabal Tsur	4,546,680
12	12	PT BPRS Al Mabrur Babadan	4,528,000
13	13	PT BPRS Jabal Nur	4,386,158
14	14	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	4,000,000
15	15	PT BPRS Ummu	3,488,400
16	16	PT BPRS Daya Artha Mentari	3,132,500
17	17	PT BPRS Lantabur Tebuireng	3,095,000
18	18	PT BPRS Rahma Syariah	3,000,000
19	19	PT BPRS Annisa Mukti	2,860,000
20	20	PT BPRS Sarana Prima Mandiri	2,625,000
21	21	PT BPRS Asri Madani Nusantara	2,478,250
22	22	PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen	2,300,000
23	23	PT BPRS Madinah	2,000,000
24	23	PT BPRS Artha Pamenang	2,000,000
25	25	PT BPRS Bhakti Haji	1,000,000
26	25	PT BPRS Unawi Barokah	1,000,000
27	***	PT BPRS Karya Mugi Sentosa	***
28	***	PT BPRS Tanmiya Artha	***
29	***	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	***

***) Data Tidak Tersedia

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan Diolah - <https://goo.gl/tWFbMu>

Tabel 1.5 diatas menunjukan posisi penyertaan modal oleh pemegang saham BPRS di provinsi Jawa Timur posisi bulan Desember 2017. Dan di peringkat dari nominal yang paling besar sampai yang paling kecil.

Tabel 1.6 Laba (Rugi) BPRS di provinsi Jawa Timur (Dalam Ribuan Rp)

NO	PERINGKAT	NAMA PERUSAHAAN	LABA(RUGI)
1	1	PT BPRS Bhakti Sumekar	14,518,212
2	2	PT BPRS Lantabur Tebuireng	6,414,670
3	3	PT BPRS Baktimakmur Indah	5,094,044
4	4	PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen	2,187,865
5	5	PT BPRS Artha Pamenang	1,499,635
6	6	PT BPRS Kota Mojokerto	1,427,045
7	7	PT BPRS Magetan	1,325,577
8	8	PT BPRS Al Mabrur Babadan	994,466
9	9	PT BPRS Madinah	619,814
10	10	PT BPRS Asri Madani Nusantara	527,248
11	11	PT BPRS Situbondo	506,885
12	12	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	460,185
13	13	PT BPRS Sarana Prima Mandiri	453,740
14	14	PT BPRS Annisa Mukti	291,370
15	15	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	244,965
16	16	PT BPRS Bumi Rinjani Batu	114,204
17	17	PT BPRS Ummu	98,420
18	18	PT BPRS Amanah Sejahtera	16,501
19	19	PT BPRS Rahma Syariah	(61,057)
20	20	PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera	(61,326)
21	21	PT BPRS Unawi Barokah	(218,027)
22	22	PT BPRS Bhakti Haji	(218,341)
23	23	PT BPRS Daya Artha Mentari	(253,534)
24	24	PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	(906,358)
25	25	PT BPRS Jabal Tsur	(1,357,487)
26	26	PT BPRS Jabal Nur	(2,037,566)
27	***	PT BPRS Karya Mugi Sentosa	***
28	***	PT BPRS Tanmiya Artha	***
29	***	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	***

***) Data Tidak Tersedia

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan Diolah - <https://goo.gl/tWFbMu>

Tabel 1.6 diatas menunjukan posisi laba (rugi) sebelum pajak BPRS di provinsi Jawa Timur posisi bulan Desember 2017. Dan di peringkat dari nominal yang paling besar sampai yang paling kecil, terdapat 6 BPRS yang mengalami kerugian di periode ini.

Dari sajian data diatas, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar yang berkantor pusat di Kabupaten Sumenep menduduki peringkat 1 dari semua aspek yang disajikan. Pada posisi laporan keuangan Desember 2017 perusahaan ini memiliki asset (*unaudited*) sebesar Rp 769,057,354 ribu rupiah atau sebesar 46.15% dari keseluruhan aset BPRS di provinsi Jawa Timur. DPK PT BPRS Bhakti Sumekar (*unaudited*) sebesar Rp 441,569,204 ribu rupiah atau sebesar 41.57% dari total DPK di provinsi Jawa Timur. PT BPRS Bhakti Sumekar menyalurkan dana pada masyarakat (*unaudited*) sebesar Rp 528,874,747 ribu rupiah atau sebesar 42.82% dari keseluruhan penyaluran dana BPRS di provinsi Jawa Timur. Penyertaan modal oleh pemegang saham sebesar Rp 96,000,000 ribu rupiah atau sebesar 43.26% dari keseluruhan penyertaan modal yang dilakukan pemegang saham di provinsi Jawa Timur. Laba bersih sebelum pajak PT BPRS Bhakti Sumekar (*unaudited*) sebesar Rp 14,518,212 ribu rupiah atau sebesar 45.83% dari keseluruhan laba (rugi) yang dicapai oleh BPRS di provinsi Jawa Timur. Berdasarkan sajian data diatas menunjukkan bahwa PT BPRS Bhakti Sumekar memiliki kinerja keuangan terbaik diantara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lain se provinsi Jawa Timur dengan indikasi seluruh komponen kinerja keuangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Persentase terbesar adalah kepemilikan asset BPRS Bhakti Sumekar yaitu sebesar 46,15% dari keseluruhan asset BPRS se provinsi Jawa Timur yang artinya jika dibandingkan secara keseluruhan, nyaris separuh asset BPRS se provinsi Jawa Timur berada di PT BPRS Bhakti Sumekar. Begitupun dengan laba yang berhasil mereka raih di tahun 2017.

PT BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu bank yang berada di Kabupaten Sumenep, dan merupakan satu-satunya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada dan beroperasi di Kabupaten Sumenep dan di beberapa kabupaten lain di Jawa Timur. PT BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumenep yang mana kepemilikan saham dominan yakni sebesar 99,99% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, sedang sisanya dimiliki oleh perseorangan. PT BPRS Bhakti Sumekar memiliki 25 kantor (pusat dan cabang) yang beroperasi di berbagai wilayah antara lain 1 kantor pusat dan 18 kantor cabang yang beroperasi di wilayah daratan Kabupaten Sumenep, 2 kantor cabang yang beroperasi di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep (Pulau Sapeken dan Pulau Masalembu), 3 kantor cabang yang beroperasi di Kabupaten Pamekasan, dan 1 kantor cabang yang beroperasi di Kabupaten Jember. Selain 25 kantor operasional, perusahaan juga memiliki 3 payment point yang berlokasi di Pasar Malam Bangkal, Universitas Wiraraja Sumenep, dan kantor PDAM Kabupaten Sumenep, juga memiliki 2 unit mobil kas keliling untuk melayani pick-up tabungan siswa di sekolah-sekolah di Sumenep dan tabungan para pedagang di wilayah pasar kecamatan di Kabupaten Sumenep. Menurut RBB yang disusun manajemen PT BPRS Bhakti Sumekar, perusahaan ini akan melakukan ekspansi usaha dengan melakukan pembukaan beberapa kantor cabang baru untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan, antara lain 5 kantor cabang di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep (Pulau Talango, Pulau Raas, Pulau Sapudi, Pulau Arjasa, dan Pulau Kangean) dan

2 kantor cabang di wilayah Kabupaten Pamekasan (Kec Larangan dan Kec Pasean) yang akan di realisasikan di tahun 2018-2019 mendatang.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya. Untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan mampu memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara maksimal dan merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat religius adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dikelola dengan prinsip syariah, pilihan yang paling tepat dalam hal ini adalah pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo yaitu PT BPR Dana Merapi yang kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk merealisasikan rencana diatas, Pemerintah Kabupaten Sumenep membuat Memorandum of Understanding (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Nomor

910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT Bank Muamalat Indonesia bertindak sebagai pelaksana teknis dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggungjawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan. Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Surat Persetujuan Nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb. Dalam perkembangannya PT BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no. 04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT BPRS Bhakti Sumekar, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengesahkannya dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31 Juli 2003 tentang Pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar. Saat ini Perda tersebut telah dirubah menjadi PERDA Nomor 20 Tahun 2011 tentang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT BPRS Bhakti Sumekar yang tertuang dalam Akta Notaris Karuniawan Surjanto, SH di Sidoarjo Nomor 9 tanggal 24 Februari 2004, pada tahun 2004, modal dasar BPRS Bhakti Sumekar sebesar Rp. 160,000,000,000 (seratus enam puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah disertakan modal oleh masing-masing pemegang saham sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Komposisi Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nominal (Rp)	%
Pemerintah Kabupaten Sumenep	19,199	95,995,000,000,-	99,99%
Perorangan (H.Moh.Toha., M.Si)	1	5,000,000,-	0,01%
	19,200	96,000,000,000,-	100%

Sumber: Laporan Auditor Independen 2017

Dari keseluruhan modal yang telah disertakan oleh pemegang saham senilai Rp 96,000,000,000 (Sembilan puluh enam milyar rupiah) sampai dengan bulan Desember 2017, tabel dibawah ini akan menampilkan rincian penyertaan modal oleh pemegang saham perusahaan dari sejak didirikan tahun 2002 hingga tahun terakhir di tahun 2017.

Tabel 1.8 Penyertaan Modal

Tahun	Nama Pemegang Saham	Nominal
2002	Pemerintah Kabupaten Sumenep	1,995,000,000
2002	Perorangan (H. Moh. Toha., M.Si)	5,000,000
2003	Pemerintah Kabupaten Sumenep	13,005,000,000
2005	Pemerintah Kabupaten Sumenep	25,000,000,000
2011	Pemerintah Kabupaten Sumenep	10,000,000,000
2012	Pemerintah Kabupaten Sumenep	10,000,000,000
2014	Pemerintah Kabupaten Sumenep	23,300,000,000
2017	Pemerintah Kabupaten Sumenep	12,695,000,000
	Total Modal Disetor	96,000,000,000

Sumber: Laporan Auditor Independen 2017

Tabel 1.8 diatas menunjukkan bahwa terdapat komitmen dan harapan yang kuat dari pemegang saham untuk terus memajukan perusahaan, penyertaan modal dengan nominal paling besar terjadi pada tahun 2005 dimana pada tahun tersebut ada produk baru yang diluncurkan oleh perusahaan yang sangat diminati masyarakat yaitu produk Rahn (Gadai Syariah).

Sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada peningkatan laba, tentunya PT BPRS Bhakti Sumekar diharapkan mampu memberikan kontribusi finansial secara optimal pada pemilik modal yaitu deviden yang secara berkelanjutan merupakan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep yang dihasilkan dari perolehan laba bersih (Audited) PT BPRS Bhakti Sumekar. Tentunya ini merupakan salah satu tantangan yang harus dijawab oleh manajemen PT BPRS Bhakti Sumekar. Untuk menjawab tantangan tersebut ditengah persaingan bisnis perbankan yang ketat, maka perusahaan harus menetapkan strategi bisnisnya agar tetap mampu bersaing dengan para kompetitor untuk meraih laba secara optimal.

Untuk mencapai tujuan diatas, PT BPRS Bhakti Sumekar melalui produk-produk perbankan unggulannya melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka.
- Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan serta melakukan pelelangan terhadap barang agunan dengan cara membeli melalui pelelangan agunan baik untuk semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan atau Tabungan pada bank lain.
- Perusahaan akan beroperasi melakukan kegiatan penyertaan modal, menyediakan pembiayaan dengan sistem Syariah terhadap kreditur maupun debitur.

Sejak pendiriannya 15 tahun yang lalu, di tengah-tengah padatnya kompetisi industri perbankan di Kabupaten Sumenep, PT BPRS Bhakti Sumekar terbukti memiliki kinerja bisnis yang sangat baik dan menjadi satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumenep yang potensial dan produktif, produk perbankan mereka sangat diminati oleh masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya, baik itu produk penghimpunan dana (*funding*) yang berupa tabungan dan deposito berjangka maupun produk penyaluran dana/pembiayaan (*lending*) yang berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumtif, gadai emas, dan berbagai bentuk produk pembiayaan lainnya. Setiap tahun terdapat peningkatan yang cukup signifikan baik dalam hal penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana/pembiayaan (*lending*), maupun peningkatan dari sisi aset perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel 1.9 dibawah ini:

Tabel 1.9 Peningkatan Kinerja Keuangan

Tahun	Penyaluran Dana Pada Masyarakat	Penghimpunan Dana Masyarakat	Aset Perusahaan
2008	110,809,075,146	49,189,177,287	135,281,834,902
2009	123,070,558,187	32,667,284,212	138,881,996,462
2010	133,235,491,284	30,723,291,383	154,349,813,701
2011	144,023,139,205	36,163,835,453	174,470,322,846
2012	184,231,930,481	61,574,483,670	228,051,014,539
2013	240,136,862,197	105,896,267,149	317,486,371,897
2014	292,873,948,028	219,585,772,173	409,092,222,447
2015	372,605,573,587	252,753,291,958	518,968,360,587
2016	428,828,715,938	334,229,324,479	615,980,904,019
2017	542,457,887,382	441,569,203,931	765,669,699,799

Sumber: Laporan Auditor Independen 2017

Tabel 1.9 diatas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sangat baik. Sejak tahun 2008 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari berbagai aspek. Dari sisi penyaluran dana, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017, disana terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 113,629,171,444 atau sebesar 26.50% dari tahun sebelumnya. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2014, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp 113,689,505,024 atau sebesar 107.36% dari tahun sebelumnya. Dari sisi aset atau kekayaan, kenaikan terbesar terjadi di tahun 2017, disana terjadi peningkatan aset perusahaan sebesar Rp 153,076,449,514 atau sebesar Rp 24.85% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa, bukan hanya pemegang saham saja, namun masyarakat pun juga mulai menaruh kepercayaan dan harapan yang tinggi pada perusahaan ini sebagai aset daerah yang potensial.

Sejak didirikan hingga pada bulan Desember 2017 tercatat bahwa PT BPRS Bhakti Sumekar telah menyetorkan deviden berupa pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 73,733,957,938 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan

ratus tiga puluh delapan rupiah). Pembayaran deviden dilakukan tahunan antara bulan Pebruari sampai dengan bulan April setelah diputuskan dan mendapatkan persetujuan dari forum tertinggi perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan mampu menjawab dan memenuhi target yang diberikan oleh pemegang saham dalam hal peningkatan kinerjanya, yang dalam hal ini termasuk target laba yang harus diraih. Berdasarkan Perda Kabupaten Sumenep No 06 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 Bab XII pasal 21 ayat (1) yang kemudian diganti dengan Perda Kabupaten Sumenep No 20 Tahun 2011 tanggal 15 Nopember 2011 Bab XIII pasal 70 ayat (2) tentang Laba Bersih PT BPRS Bhakti Sumekar setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:

Deviden untuk pemegang saham	50%
Cadangan umum	10%
Cadangan tujuan	15%
Dana kesejahteraan	10%
Jasa produksi	12.5%
Dana sosial	2.5%

Tahun 2008

Laba Bersih Audited	7,940,591,864
---------------------	---------------

Di distribusikan untuk:

Deviden Untuk Pemegang Saham	3,970,295,932
Cadangan Umum	794,059,186
Cadangan Tujuan	1,191,088,780
Dana Kesejahteraan	794,059,186
Jasa Produksi	992,573,983
Dana Sosial	198,514,797

Tahun 2009

Laba Bersih Audited	8,213,090,830
---------------------	---------------

Di distribusikan untuk:

Deviden Untuk Pemegang Saham	4,106,545,415
Cadangan Umum	821,309,083
Cadangan Tujuan	1,231,963,625
Dana Kesejahteraan	821,309,083
Jasa Produksi	1,026,636,354
Dana Sosial	205,327,271

Tahun 2010

Laba Bersih Audited	8,063,755,216
---------------------	---------------

Di distribusikan untuk:

Deviden Untuk Pemegang Saham	4,031,877,608
Cadangan Umum	806,375,522
Cadangan Tujuan	1,209,563,282
Dana Kesejahteraan	806,375,522
Jasa Produksi	1,007,969,402
Dana Sosial	201,593,880

Tahun 2011

Laba Bersih Audited	8,313,160,526
---------------------	---------------

Di distribusikan untuk:

Deviden Untuk Pemegang Saham	4,156,580,263
Cadangan Umum	831,316,053
Cadangan Tujuan	1,246,974,079
Dana Kesejahteraan	831,316,053
Jasa Produksi	1,039,145,066
Dana Sosial	207,829,013

Tahun 2012

Laba Bersih Audited	8,508,557,176
---------------------	---------------

Di distribusikan untuk:

Deviden Untuk Pemegang Saham	4,254,278,588
Cadangan Umum	850,855,718
Cadangan Tujuan	1,276,283,576
Dana Kesejahteraan	850,855,718
Jasa Produksi	1,063,569,647
Dana Sosial	212,713,929

Tahun 2013

Laba Bersih Audited	9,910,637,652
---------------------	---------------

Di distribusikan untuk:

Dividen Untuk Pemegang Saham	4,955,318,826
Cadangan Umum	991,063,765
Cadangan Tujuan	1,486,595,648
Dana Kesejahteraan	991,063,765
Jasa Produksi	1,238,829,707
Dana Sosial	247,765,941

Tahun 2014

Laba Bersih Audited	11,876,491,752
---------------------	----------------

Di distribusikan untuk:

Dividen Untuk Pemegang Saham	5,938,245,876
Cadangan Umum	1,187,649,175
Cadangan Tujuan	1,781,473,763
Dana Kesejahteraan	1,187,649,175
Jasa Produksi	1,484,561,469
Dana Sosial	296,912,294

Tahun 2015

Laba Bersih Audited	11,647,274,028
---------------------	----------------

Di distribusikan untuk:

Dividen Untuk Pemegang Saham	5,823,637,014
Cadangan Umum	1,164,727,403
Cadangan Tujuan	1,747,091,104
Dana Kesejahteraan	1,164,727,403
Jasa Produksi	1,455,909,254
Dana Sosial	291,181,851

Tahun 2016

Laba Bersih Audited	12,006,731,906
---------------------	----------------

Di distribusikan untuk:

Dividen Untuk Pemegang Saham	6,003,365,953
Cadangan Umum	1,200,673,191
Cadangan Tujuan	1,801,009,786
Dana Kesejahteraan	1,200,673,191

Jasa Produksi	1,500,841,488
Dana Sosial	300,168,298

Tahun 2017

Laba Bersih Audited	12,638,016,064
---------------------	----------------

Di distribusikan untuk:

Deviden Untuk Pemegang Saham	6,319,008,032
Cadangan Umum	1,263,801,606
Cadangan Tujuan	1,895,702,410
Dana Kesejahteraan	1,263,801,606
Jasa Produksi	1,579,752,008
Dana Sosial	315,950,402

Setiap tahunnya perusahaan membayarkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Dana Sosial sebesar 2,5% dari laba bersih setelah audit yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana cadangan umum sebesar 10% dari laba bersih dipergunakan perusahaan sebagai cadangan untuk kesejahteraan karyawan mereka, sejauh ini dana cadangan umum dipergunakan untuk memberangkatkan umroh beberapa karyawan dan keluarganya yang telah memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan perusahaan, juga digunakan untuk membantu meringankan biaya tak terduga karyawan yang bersifat mendesak dan harus segera dipenuhi misalnya biaya pengobatan untuk karyawan atau anggota keluarga karyawan. Kemudian deviden merupakan pembayaran hasil investasi pada pemegang saham, dan Jasa Produksi adalah bonus tahunan yang diberikan perusahaan kepada seluruh penguus dan karyawan perusahaan. Dana ini dibagikan kepada karyawan sesuai porsi yang telah ditentukan sebelumnya dan dibagikan setelah diputuskan dalam RUPS.

Dalam RUPS, berdasarkan hasil kinerja tahun sebelumnya, pemegang saham akan menetapkan target deviden yang harus dibayarkan perusahaan di tahun

berikutnya, tentu hal ini merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai pembuktian bahwa perusahaan mampu bertahan dalam kondisi persaingan usaha seperti apapun. Adapun rincian target pembayaran dan realisasi pembayaran deviden pada pemegang saham selama sepuluh tahun terakhir oleh perusahaan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1.10 Pembayaran Deviden

No	Tahun	Target Pembayaran	Realisasi Pembayaran	% Pencapaian
1	2008	3,750,000,000	3,970,295,932	105.87%
2	2009	4,000,000,000	4,106,545,415	102.66%
3	2010	4,000,000,000	4,031,877,608	100.80%
4	2011	4,000,000,000	4,156,580,263	103.91%
5	2012	4,100,000,000	4,254,278,588	103.76%
6	2013	4,500,000,000	4,955,318,826	110.12%
7	2014	5,500,000,000	5,938,245,876	107.97%
8	2015	5,500,000,000	5,823,637,014	105.88%
9	2016	6,000,000,000	6,003,365,953	100.06%
10	2017	6,100,000,000	6,319,008,032	103.59%

Sumber: Laporan Auditor Independen 2017

Hal ini membuktikan bahwa PT BPRS Bhakti Sumekar memiliki tingkat profitabilitas yang sangat tinggi. Perusahaan berhasil menjawab tantangan yang diberikan oleh pemegang saham, yaitu menghasilkan deviden yang melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan secara keseluruhan, antara deviden yang telah dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 73,733,957,938 terhadap keseluruhan modal yang disertakan oleh pemegang saham sebesar Rp. 96,000,000,000 maka deviden yang diterima oleh pemegang saham hingga bulan Desember 2017 adalah sebesar 76,81%.

Secara finansial, tentunya kondisi seperti inilah yang diharapkan oleh pemegang saham perusahaan dimanapun, perusahaan yang dapat menjamin keamanan investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham serta mendapatkan

keuntungan yang optimal dari penanaman modal tersebut, terlebih jika modal yang ditanamkan berasal dari “Kas Negara”.

Kinerja bisnis yang baik perusahaan dalam menyediakan produk dan memberikan pelayanan yang prima telah membuahkan prestasi yang diakui oleh banyak pihak. Tak sedikit penghargaan telah diterima oleh PT BPRS Bhakti Sumekar, hal ini merupakan hasil dari kemitraan yang dibina oleh bank dengan nasabah, bank dengan masyarakat maupun manajemen perusahaan dengan karyawannya. Beberapa penghargaan tersebut antara lain:

- Pada 04 Oktober 2012 Penghargaan *Infobank Sharia Finance Award 2012* dengan predikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2011.
- Pada 22 Pebruari 2013 Peringkat kedua *The Best Islamic Rural Bank dalam Islamic Finance Award* oleh Karim Business Consulting.
- Pada 06 Nopember 2013 Penghargaan *Infobank Sharia Finance Award 2013* dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan tahun 2012.
- Pada 24 Pebruari 2014 Peringkat Pertama *The Most Profitable Islamic Rural Bank Asets $\geq$ IDR 100 Bn* dalam Islamic Finance Award oleh Karim Business Consulting.
- Pada 24 Pebruari 2014 Peringkat Pertama *The Most Profitable Islamic Rural Bank Java Region dalam Islamic Finance Award* oleh Karim Business Consulting.
- Pada 24 Februari 2014 Peringkat Kedua *The Best Islamic Rural Bank Asets $\geq$ IDR 100 Bn* dalam Islamic Finance Award oleh Karim Business Consulting.

- Pada 24 Februari 2014 Peringkat Kedua *The Best Islamic Rural Bank Java Region dalam Islamic Finance Award* oleh Karim Business Consulting.
- Pada 30 September 2014 Penghargaan Infobank *Sharia Finance Award 2014* dengan predikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2013.
- Peringkat Pertama BUMD Leader Dalam *Madura Award 2014*.
- Pada 16 Oktober 2015 Penghargaan *Infobank Sharia Finance Award 2015* dengan predikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2014.
- Peringkat Pertama BUMD Leader dalam *Madura Award 2015*.
- Pada 30 September 2016 Penghargaan *Infobank Sharia Finance Award 2016* dengan predikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan 2015.
- Pada 30 September 2016 Penghargaan *Golden Award 2011 - 2015 Atas Kinerja Keuangan Selama 5 tahun berturut-turut* dengan Predikat Sangat Bagus oleh Infobank Sharia Finance Award 2016.
- Penghargaan BUMD Terbaik Se-Madura dalam *Madura Award 2016*.

Selain menerapkan strategi dalam bisnis perbankan melalui peluncuran produk-produk menarik yang diminati oleh masyarakat, manajemen PT BPRS Bhakti Sumekar juga menerapkan strategi pengelolaan sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia PT BPRS Bhakti Sumekar menyiapkan seluruh sumber daya manusianya agar mampu bersaing baik dalam hal performa maupun dalam hal pelayanan pada nasabah, sehingga nantinya setiap karyawan diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal pada tujuan perusahaan yaitu peningkatan laba usaha.

Perusahaan memiliki komitmen untuk selalu memberi perhatian yang besar agar standar remunerasi PT BPRS Bhakti Sumekar memiliki posisi yang baik dan kompetitif di pasar. Sistem remunerasi yang diterapkan dengan dasar *pay for position* dan *pay for performance*. Remunerasi terdiri dari gaji dan berbagai fasilitas yang ditujukan untuk merangsang kinerja terbaik pegawai. Sistem remunerasi diarahkan agar memperbesar porsi *variable pay* dibandingkan dengan *fixed pay*. Adapun dasar Penentuan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah serta karyawan mengacu pada Peraturan Menteri dalam negeri No 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sampai dengan bulan Desember 2017, PT BPRS Bhakti Sumekar memiliki sebanyak 207 orang sumber daya manusia yang terdiri dari jajaran pengurus, dan karyawan baik staff maupun non-staff, dari keseluruhan SDM yang dimiliki, sepanjang tahun 2017 PT BPRS Bhakti Sumekar mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan bagian Personalia sebesar Rp 15,450,621,580 (lima belas milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen dan perhatian yang baik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas sumber daya manusianya melalui pemberian imbalan yang cukup tinggi dan pemberian pendidikan dan pelatihan secara rutin pada seluruh karyawan. Adapun rincian biaya personalia PT BPRS Bhakti Sumekar untuk tahun 2017 dengan angka pembanding biaya personalia tahun 2016 dapat dilihat melalui tabel berikut

Tabel 1.11 Biaya Personalia

No	Rincian	2017	2016
1	Biaya Personalia	13,012,138,792	1,381,765,939
2	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	578,619,936	415,060,848
3	Tunj Telekomunikasi Karyawan	639,636,650	60,538,388
4	Tunj Transportasi Karyawan	1,220,226,202	88,383,224
Total		15,450,621,580	3,245,748,399

Sumber: Laporan Auditor Independen

Pada tahun 2017, perusahaan mengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan karyawan sebesar Rp 578,619,936 (lima ratus tujuh puluh delapan juta, enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 3.74% dari keseluruhan biaya personalia di tahun tersebut.

Perusahaan mengelompokkan kedalam 11 program pelatihan dan pendidikan yang telah diberikan pada karyawan dan pengurus sepanjang tahun 2017 antara lain:

1) General Banking

- Pelatihan dasar perbankan Syariah beserta pengenalan produk dan sistem corebanking untuk karyawan baru selama 1 Minggu
- Pelatihan Dasar Akutansi Ijarah Oleh Wiroso
- Pelatihan dasar Perbankan Syariah dengan Peserta OJT (On Job Training)

2) Retail & Micro Banking

- Training dan Ujian Manajemen Resiko
- Pelatihan dan Ujian Certif Direksi untuk 3 orang direksi
- Pelatihan dan Ujian Certif Direksi untuk 3 orang officer
- Pelatihan dan Ujian Certif Direksi untuk 2 orang officer dan 1 orang komisaris

3) Legal and Sharia Compliance

- Pelatihan Manajemen Risiko Perbamida

- Pelatihan Manajemen Risiko Asbisindo
- Pelatihan Amnesti Pajak
- Pelatihan Aspek Legal
- Pengembangan Pengelolaan BUMD

4) *Service, Selling, & Marketing*

- Pelatihan dan pengembangan skill tenaga marketing

5) *Consumer & Comercial Banking*

- Rakor Kredit Linkage UMKM Primer Bank Jatim
- Lokakarya Air Minum dan Sanitasi
- Undangan workshop water.org Surabaya
- Pelatihan restrukturisasi pembiayaan
- Undangan Seminar water.org ke Filipina
- Pelatihan Analisa Pembiayaan Sindikasi Keuangan
- Pelatihan Bedah Kasus Pembiayaan Syariah

6) *Information Tecnology Program*

- Sosialisasi Microsoft Server
- Gathering Telkom VPN IP
- Refreshment Pelaporan SID
- Pelatihan Pelaporan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK

7) *Workshop*

- Workshop LPS dan Kompartemen Asbisindo Lampung
- Workshop Refinancing Syariah
- Workshop Akutansi Syariah

- Workshop SOP dan Akad Pembiayaan Syariah

8) Seminar

- Seminar Perpajakan
- Seminar PPATK
- Seminar peran LPS
- Seminar Nasional dan Infobank Sharia Award

9) *Consultancy & Assesment Center*

- Konsultasi Akad - Akad Pembiayaan

10) *Comparative Study*

- Studi Banding BPR Lamongan
- Studi Banding BPRS Amanah Ummah
- Studi Banding BPRS Bahari Berkesan Ternate
- Studi Banding P4S Sedulur Tani Jombang

11) Program lainnya

- Rakor Distribusi Buku Khotbah
- Diseminasi Buku Khotbah
- *Islamic Development Bank Global Forum*
- Rakerda dan Rakernas Perbamida
- Pembahasan RKT 2016 OJK
- Pembahasan SOP Perbankan
- Kompartemen BPRS se Jatim
- Evaluasi BPR Sharing GCG
- Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah se Indonesia

- Evaluasi Kinerja BPR/S Semester 2 Tahun 2016
- Pertemuan Forsib Jati
- Gathering BPJS

Kegiatan-kegiatan tersebut telah diselenggarakan dan diikuti oleh karyawan perusahaan sepanjang tahun 2017, yang artinya perusahaan sangat peduli dengan kapasitas dan pengetahuan karyawannya agar mampu memberikan kinerja yang terbaik pada perusahaan, mampu memberikan pelayanan prima pada nasabah, dan mampu bersaing dengan ketat dengan para kompetitor.

Namun sampai dengan penelitian ini dilakukan, perusahaan belum memiliki standar baku penilaian kinerja pada karyawannya. Penilaian selama ini dilakukan hanya berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh masing-masing karyawan berdasarkan target dan kewajiban karyawan. Tidak menutup kemungkinan hal ini dapat menyebabkan bias dan tidak objektif dalam melakukan penilaian kinerja, dan bahkan sangat memungkinkan perusahaan akan melakukan penilaian kinerja berdasarkan *like and dislike*. Tentu hal ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan dan sangat merugikan pada karyawan. Perusahaan sangat membutuhkan standar penilaian kinerja yang baku, yang mencakup seluruh bagian di dalam perusahaan, dengan begitu perusahaan dapat lebih mudah dalam menentukan keputusan, mengarahkan karyawan, menetapkan reward and punishment, melakukan rekrutment, dan lain sebagainya.

Melalui ulasan diatas, peneliti tertarik untuk mengukur kinerja di PT BPRS Bhakti Sumekar, dan bagaimana strategi perusahaan diterapkan oleh seluruh sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Sumber daya manusia merupakan “aset strategis” perusahaan, dengan kata lain sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting dari eksistensi sebuah perusahaan, karena tanpa adanya dukungan produktivitas sumber daya manusia yang baik, maka perusahaan tidak mungkin dapat melaksanakan aktivitas bisnisnya secara optimal. Pengelolaan sumber daya manusia bagi perusahaan merupakan pilihan yang sangat strategis, karena dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, akan menciptakan satuan kerja yang efektif dan secara bersamaan dapat meningkatkan kinerja karyawan, hal ini merupakan nilai tambah bagi perusahaan tersebut.

Becker et al (2009), menyatakan bahwa pencapaian sasaran strategi perusahaan dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja secara menyeluruh terhadap indikator-indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan perusahaan. (Moeheriono, 2010). Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan harapan perusahaan (Wibowo, 2009).

Kaplan dan Norton pada tahun 1992 memperkenalkan teknik pengukuran kinerja yang melibatkan pengukuran aspek finansial dan non finansial, dikenal dengan istilah Balanced Scorecard. Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan

strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran, yang tersusun ke dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan pada model Balanced Scorecard, dikembangkan suatu alat baru dalam manajemen sumber daya manusia dan pengukuran kinerja karyawan yaitu Human Resources Scorecard. Model ini diperkenalkan oleh Brian E. Becker, Mark A. Huselid, dan Dave Ulrich pada tahun 2001.

HR *Scorecard* mencoba mengukur sumber daya manusia dengan mengkaitkan antara orang-strategi-kinerja untuk menghasilkan perusahaan yang excellent, dan juga menjabarkan visi, misi, strategi, menjadi aksi human resources yang dapat diukur kontribusinya. Pencapaian sasaran akan sangat tergantung pada resources lainnya (mesin, material, metode, maupun keuangan), dimana resources tersebut hanya akan bergerak jika manusianya bergerak (Cahyaningsih, 2003).

PT BPRS Bhakti Sumekar menilai sumber daya manusia merupakan *intangible asset* yang tidak kalah pentingnya dengan *tangible asset*. Perusahaan membutuhkan karyawan yang dibina dan dididik untuk memberikan kinerja yang terbaik. Dengan memiliki sumber daya manusia yang handal dan kompetitif akan meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan laba perusahaan.

Perusahaan perlu melakukan pengukuran keberhasilan strategi pada level sumber daya manusia, karena strategi inilah yang nantinya akan menentukan berhasil atau tidaknya sumber daya manusia dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Oleh karena itu,

PT BPRS Bhakti Sumekar perlu melakukan pengukuran kinerja sumber daya manusia dengan menggunakan metode *HR Scorecard*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah pengukuran kinerja sumber daya manusia PT BPRS Bhakti Sumekar berdasarkan pendekatan *HR Scorecard*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model serta mengukur kinerja sumber daya manusia di PT BPRS Bhakti Sumekar berdasarkan pendekatan *HR Scorecard*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Bagi Penulis

Penulis dapat memiliki gambaran lebih luas untuk memahami teori Manajemen Sumber Daya Manusia yang terus berkembang terutama dalam hal pengukuran kinerja menggunakan pendekatan *HR Scorecard*.

2) Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan tentang manajemen kinerja pada PT BPRS Bhakti Sumekar.

3) Bagi Akademik

Bagi lingkungan akademik pada umumnya, dan Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura pada khususnya, diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengukuran kinerja melalui pendekatan *HR Scorecard*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian difokuskan pada pengukuran kinerja karyawan PT BPRS Bhakti Sumekar dengan menggunakan pendekatan *HR Scorecard* dan *Analythical Hierarchy Process* (AHP).